

UPAYA MENGATASI PEMBAJAKAN DAN PERAMPOKAN DI PERAIRAN ASIA TENGGARA MELALUI ASEAN MARITIM FORUM

A. Ratu Amanda Gading Ahmad Iqbal¹, Ishaq Rahman²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 2024

Revised December 2024

Accepted December 2024

Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

¹ratumandaaa@gmail.com

²ishaq@unhas.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstract

This study examines the efforts of Southeast Asian countries to combat piracy and maritime robbery through the ASEAN Maritime Forum (AMF). Using a qualitative research method with a literature review approach, the study finds that AMF plays a critical role in strengthening coordination among ASEAN member states to address maritime threats. Key findings show that mechanisms such as intelligence sharing, joint patrols, and joint exercises among ASEAN security forces have enhanced operational preparedness. However, the study also identifies challenges, including differences in legal frameworks, resource limitations, and political tensions that hinder effective cooperation. Despite these challenges, AMF continues to serve as a vital facilitator of regional cooperation, with the potential to

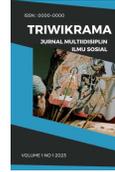
improve maritime security in Southeast Asia. The study emphasizes the importance of better coordination, policy harmonization, and sustained diplomacy to overcome these obstacles.

Keyword : *Maritime security, ASEAN Maritime Forum, piracy, regional cooperation, political challenges*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji upaya negara-negara Asian Tenggara dalam mengatasi pembajakan dan perampokan maritim melalui ASEAN Maritime Forum (AMF). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan tinjauan literatur, studi ini mengemukakan bahwa AMF memainkan peran penting dalam memperkuat koordinasi antar negara anggota ASEAN untuk mengatasi ancaman maritim. Temuan-temuan utama menunjukkan bahwa mekanisme seperti pembagian intelijen, patroli bersama, dan latihan bersama di antara pasukan keamanan ASEAN telah meningkatkan kesiapan operasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan, termasuk perbedaan kerangka hukum, keterbatasan sumber daya, dan ketegangan politik yang menghambat kerja sama yang efektif. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, AMF terus berperan sebagai fasilitator penting dalam kerja sama regional, yang berpotensi meningkatkan keamanan maritim di Asia Tenggara. Studi ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik, harmonisasi kebijakan, dan diplomasi berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata kunci: *Keamanan Maritim, ASEAN Maritime Forum, Pembajakan, Kerjasama Regional, Tantangan Politik*



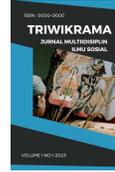
PENDAHULUAN

Keamanan maritim menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian di tingkat global, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini memiliki posisi geografis yang strategis, menghubungkan dua samudra besar yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yakni Asia dan Australia. Selat Malaka, yang berada di tengah kawasan ini, merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dilalui oleh hampir sepertiga perdagangan global dan setengah dari pasokan minyak dunia. Keamanan di jalur laut ini sangat penting, mengingat semakin meningkatnya volume perdagangan dan arus barang yang melintasi perairan Asia Tenggara. Namun, semakin padatnya lalu lintas pelayaran ini juga membuka peluang bagi terjadinya kejahatan maritim, terutama pembajakan dan perampokan yang mengancam kelancaran perdagangan internasional dan keselamatan kapal serta awaknya (Bueger, 2015).

Masalah pembajakan dan perampokan di kawasan maritim Asia Tenggara sudah berlangsung lama dan semakin memburuk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh International Maritime Bureau (IMB), dalam laporan tahunan mereka, kawasan Asia Tenggara mencatatkan angka kejadian pembajakan tertinggi di dunia. Pada tahun 2020, IMB melaporkan bahwa dari 195 kejadian pembajakan yang tercatat di seluruh dunia, sekitar 120 kasus di antaranya terjadi di kawasan Asia, dengan sebagian besar terjadi di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura (Bateman, 2003). Pada tahun 2021, meskipun ada penurunan jumlah kejadian, Asia Tenggara masih mendominasi dengan lebih dari 60% dari total kasus pembajakan global. Kejahatan ini tidak hanya terbatas pada perompakan terhadap kapal dagang, tetapi juga mencakup perampokan terhadap kapal-kapal yang sedang mengangkut sumber daya alam seperti minyak, gas, dan barang berharga lainnya (Bakamla RI, 2022).

Jenis-jenis kejahatan maritim yang terjadi di kawasan ini meliputi pembajakan, perampokan, pencurian kargo, dan penculikan pelaut. Pembajakan sering kali melibatkan perompakan terhadap kapal-kapal kargo yang melintasi perairan internasional, di mana perompak akan menyerang kapal untuk merampas barang berharga atau bahkan membajak kapal untuk tujuan tertentu. Perampokan di laut juga sering terjadi di perairan yang lebih dekat ke daratan, di mana perompak biasanya mencuri kargo atau mengambil barang berharga dari kapal. Selain itu, kejahatan penculikan pelaut untuk mendapatkan tebusan juga masih sering terjadi, menambah kompleksitas masalah ini.

Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, mengingat kejahatan maritim seringkali melibatkan lebih dari satu negara, baik dari sisi lokasi kejadian, pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan. Kejahatan ini juga berpotensi merusak hubungan antarnegara jika tidak ada kerjasama yang efektif untuk mengatasi dan mengurangi dampaknya (Rijal, 2018). Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini melalui forum-forum maritim yang ada. Salah satu inisiatif kerjasama yang penting dalam mengatasi pembajakan dan perampokan maritim adalah *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, yang merupakan wadah bagi negara-negara ASEAN untuk berkoordinasi dalam menjaga keamanan dan kestabilan maritim di kawasan Asia Tenggara.



Kerja sama dalam AMF penting karena, dengan kompleksitas dan luasnya wilayah maritim Asia Tenggara, satu negara tidak dapat secara efektif mengatasi masalah ini sendirian. Kejahatan transnasional seperti pembajakan dan perampokan memerlukan upaya kolektif dan koordinasi antarnegara yang lebih erat, termasuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan operasi bersama di laut. Melalui AMF, negara-negara ASEAN dapat merumuskan strategi dan kebijakan bersama untuk menangani kejahatan maritim, memperkuat pengawasan di perairan mereka, dan melakukan tindakan preventif serta penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku kejahatan.

Dengan adanya AMF, negara-negara ASEAN dapat menciptakan mekanisme yang lebih terkoordinasi dalam menangani masalah pembajakan dan perampokan yang merugikan perekonomian kawasan dan mengancam keselamatan pelaut dan kapal. Melalui kerja sama ini, diharapkan keamanan maritim di Asia Tenggara dapat lebih terjaga, dan jalur perdagangan internasional yang melintasi kawasan ini dapat tetap aman dan bebas dari ancaman kejahatan maritim (Bueger, 2015). Maka dari itu, artikel ini dibuat bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi masalah pembajakan dan perampokan maritim melalui kerja sama regional yang difasilitasi oleh AMF, serta menggambarkan seberapa serius dampak dari kejahatan maritim terhadap jalur perdagangan internasional. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kolaborasi antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam menjaga keamanan maritim dan melindungi kepentingan ekonomi global.

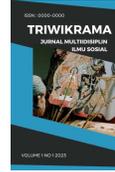
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis upaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi *piracy and robbery* melalui ASEAN Maritime Forum. Metode kualitatif dipilih karena dapat menggali secara mendalam dinamika kerjasama, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam forum maritim ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, termasuk laporan resmi dari AMF serta publikasi dari organisasi internasional terkait keamanan maritim. Selain itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal dan laporan organisasi non-pemerintah yang relevan dengan isu maritim dan keamanan di Asia Tenggara.

PEMBAHASAN

A. Peran AMF dalam Mengatasi Pembajakan dan Perampokan di Laut

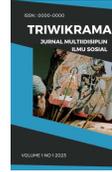
Meskipun negara-negara di kawasan ini telah berusaha menangani masalah tersebut secara individu, tantangan lintas batas memerlukan kerja sama regional yang lebih erat. Dalam konteks ini, AMF memainkan peran penting sebagai platform koordinasi untuk memerangi kejahatan maritim secara efektif dan berkelanjutan. AMF memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi antara negara-negara ASEAN untuk menghadapi ancaman kejahatan maritim, termasuk pembajakan dan perampokan. Salah satu bentuk koordinasi yang sangat diperlukan adalah pertukaran data intelijen dan informasi antar negara anggota ASEAN. Dengan



adanya pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai aktivitas maritim yang mencurigakan, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan respons mereka terhadap ancaman pembajakan dan perampokan. Misalnya, informasi mengenai kapal yang berpotensi menjadi target pembajakan atau lokasi-lokasi rawan perompakan dapat segera dibagikan antar negara, memungkinkan negara-negara untuk melakukan tindakan preventif atau mempercepat proses evakuasi jika diperlukan (Darmawan, 2022).

Contoh konkret dari hasil koordinasi ini adalah pelaksanaan patroli laut bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan utama dunia yang sangat rentan terhadap pembajakan, mengingat kepadatan kapal yang melintas. Melalui kerja sama ini, ketiga negara tidak hanya berbagi sumber daya seperti kapal patroli dan personel penjaga pantai, tetapi juga berbagi data intelijen tentang ancaman yang ada di wilayah tersebut (Indraswari, 2022). Koordinasi ini berhasil menurunkan angka pembajakan di Selat Malaka dan menunjukkan pentingnya kolaborasi regional dalam menghadapi kejahatan maritim. Selain itu mereka memiliki peran Menginisiasi Ikatan Kapasitas Aparat (Latihan Bersama) yang mana Latihan bersama antar aparat keamanan negara-negara ASEAN, termasuk angkatan laut dan penjaga pantai, merupakan salah satu strategi penting yang diinisiasi oleh AMF untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maritim. Latihan bersama ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan teknis dan operasional aparat di lapangan, serta untuk meningkatkan koordinasi antar negara dalam menangani situasi darurat di laut (Naim, 2021). Dampak positif dari latihan bersama ini sangat signifikan, karena selain meningkatkan kesiapsiagaan, juga memungkinkan aparat keamanan maritim untuk lebih memahami prosedur operasi standar yang digunakan oleh negara-negara tetangga, yang pada akhirnya mempercepat respons terhadap ancaman kejahatan maritim.

Adapun peran lainnya yaitu mendorong keterlibatan negara-negara ASEAN dalam kerja sama internasional. AMF juga berperan dalam mendorong negara-negara ASEAN untuk terlibat lebih aktif dalam kerja sama internasional terkait dengan keamanan maritim. Salah satu fokus utama AMF adalah menghubungkan negara-negara ASEAN dengan organisasi internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO) dan lembaga-lembaga internasional lainnya, untuk memastikan keamanan di perairan internasional dapat dijaga dengan baik. AMF membantu negara-negara ASEAN dalam menjalin kemitraan dengan negara-negara di luar kawasan, serta memastikan negara-negara ASEAN berpartisipasi dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan pembajakan dan perampokan maritim (Gaol, & Rani, 2017). Sebagai contoh, AMF telah mendukung pelaksanaan patroli laut bersama yang melibatkan negara ASEAN dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia. Selain itu, AMF juga berperan dalam penguatan peraturan internasional yang berkaitan dengan keamanan maritim, termasuk upaya memperkuat konvensi internasional yang melibatkan negara-negara pembuat kebijakan. Kerja sama ini penting karena kejahatan maritim, seperti pembajakan dan perampokan, tidak mengenal batas negara, sehingga memerlukan kerjasama antar negara dalam skala global untuk menciptakan wilayah perairan yang aman.

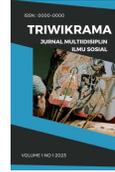


Mendorong penguatan hukum di masing-masing negara juga merupakan salah satu peran penting AMF adalah membantu negara-negara ASEAN dalam memperkuat sistem hukum mereka terkait dengan keamanan maritim dan penindakan terhadap pembajakan dan perampokan (Hardi, 2020). AMF menyadari bahwa setiap negara anggota memiliki kebijakan hukum yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan maritim. Oleh karena itu, AMF berupaya untuk menyelaraskan peraturan dan kebijakan hukum antar negara ASEAN agar dapat mengatasi kejahatan maritim secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, AMF mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat sistem peradilan maritim mereka, termasuk peraturan yang mengatur hak penangkapan kapal yang terlibat dalam pembajakan atau perampokan, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan maritim. Melalui AMF, negara-negara ASEAN juga diajak untuk mengadopsi instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan kapal dan pelaut di wilayah maritim, serta memperbaiki prosedur hukum dalam menghadapi kasus pembajakan. Dampak dari penguatan hukum ini cukup signifikan, karena dapat menurunkan angka pembajakan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan jalur perdagangan maritim di kawasan ASEAN.

B. Tantangan AMF dalam Mengatasi Pembajakan dan Perampokan di Laut

Salah satu tantangan utama yang dihadapi AMF dalam mengatasi *piracy dan robbery* adalah isu kedaulatan negara atas perairan yang seringkali menimbulkan hambatan dalam kerja sama internasional (Saptenno, 2012). Masalah kedaulatan ini muncul ketika negara-negara ASEAN memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan batas maritim dan hak pengelolaan wilayah laut mereka. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas operasi bersama dalam mengatasi pembajakan dan perampokan. Sebagai contoh, perbedaan pandangan mengenai garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sering kali menambah kompleksitas dalam pelaksanaan patroli laut bersama. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan maritim, isu kedaulatan dapat mempengaruhi koordinasi yang efektif dan memperlambat implementasi kebijakan bersama.

Tantangan berikutnya yang dihadapi AMF adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di beberapa negara ASEAN. Banyak negara anggota yang menghadapi kekurangan dalam hal pelatihan aparat keamanan maritim dan kurangnya tenaga ahli di sektor ini, yang menghambat pelaksanaan kebijakan AMF secara efektif. SDM yang terbatas mempengaruhi kesiapsiagaan operasional dalam menangani ancaman maritim, karena aparat yang kurang terlatih mungkin tidak dapat merespons situasi dengan cepat atau efisien. Untuk mengatasi masalah ini, AMF telah menginisiasi program pelatihan bersama dan peningkatan kapasitas aparat, bekerja sama dengan negara-negara atau organisasi internasional yang memiliki keahlian lebih dalam hal keamanan maritim. Meskipun demikian, keterbatasan SDM tetap menjadi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian lebih dalam meningkatkan kesiapan aparat di seluruh kawasan.



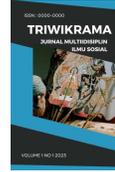
Beberapa negara ASEAN juga menghadapi tantangan besar terkait dengan keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah pembajakan dan perampokan di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan mekanisme koordinasi, baik dalam aspek diplomatik maupun operasional, untuk mempercepat respons terhadap ancaman kejahatan maritim. Salah satu cara untuk memperkuat koordinasi adalah dengan mengembangkan pusat informasi maritim yang dapat memfasilitasi pertukaran data intelijen antar negara anggota. Selain itu, pelaksanaan operasi gabungan yang lebih sering dan terkoordinasi akan memastikan adanya kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman tersebut. Peningkatan kesadaran dan komitmen negara-negara ASEAN terhadap pentingnya keamanan maritim yang lebih koheren juga harus diperkuat agar upaya ini dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan (Sari, 2019).

Mendukung operasi keamanan maritim, yang mana anggaran yang terbatas sering kali menghambat pengadaan peralatan canggih yang diperlukan untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di laut, seperti kapal patroli modern dan sistem radar yang efisien. Selain itu, kurangnya infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan yang memadai, dapat mengurangi efektivitas kebijakan AMF. Untuk mengatasi keterbatasan ini, AMF mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional yang dapat menyediakan bantuan teknis dan finansial. Dengan dukungan ini, diharapkan negara-negara ASEAN dapat memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman pembajakan dan perampokan di laut.

Ketegangan politik dan konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga menjadi tantangan bagi AMF dalam menjaga stabilitas regional dan mendorong kerja sama yang lebih erat antara negara-negara ASEAN. Ketidakstabilan politik dalam beberapa negara dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomitmen pada kebijakan maritim bersama atau mengimplementasikan langkah-langkah yang disepakati di forum ini. Misalnya, ketegangan terkait dengan klaim wilayah di Laut China Selatan dapat mengganggu fokus negara-negara ASEAN terhadap masalah keamanan maritim lainnya, termasuk pembajakan dan perampokan. AMF berusaha menjembatani perbedaan ini dengan mendorong dialog dan mediasi di antara negara-negara yang terlibat, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keamanan maritim bagi stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Meskipun tantangan politik ini sulit diatasi, AMF tetap berperan sebagai platform yang memungkinkan negara-negara ASEAN untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengurangi ancaman di laut (Sari, 2019).

C. Penguatan Peran AMF dalam Mengatasi Pembajakan dan Perampokan

Selain koordinasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur maritim juga menjadi faktor krusial untuk penguatan peran AMF. Negara-negara ASEAN perlu melakukan pelatihan intensif dan pendidikan bagi aparat keamanan maritim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel yang terlatih. Program pelatihan ini juga harus mencakup berbagi pengetahuan antara negara anggota agar standar operasional dan respons terhadap ancaman maritim menjadi lebih seragam. Di samping itu, pengembangan



infrastruktur maritim yang lebih modern, seperti teknologi pemantauan dan pengadaan kapal patroli canggih, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pembajakan dan perampokan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional, yang memiliki keahlian dan sumber daya, dapat membantu mendanai proyek-proyek penguatan kapasitas ini (Kurnia, 2006).

AMF juga harus memperkuat kemitraan dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN serta organisasi internasional untuk memperluas jangkauan upaya memerangi pembajakan di tingkat global. Kemitraan ini penting dalam hal patroli laut bersama, pertukaran data intelijen, serta penyusunan perjanjian hukum internasional yang dapat mengatasi kejahatan maritim secara lebih komprehensif (Muhamad, 2016). Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN dalam menghadapinya, tetapi juga memperkuat jaringan keamanan global. Peningkatan hubungan dengan organisasi internasional seperti PBB, IMO, dan Interpol dapat memberikan dukungan yang lebih besar dalam menciptakan sistem keamanan maritim yang lebih terkoordinasi dan efektif.

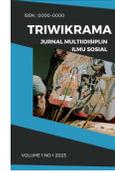
Namun, tantangan utama dalam penguatan peran AMF adalah penyelesaian isu politik dan keamanan yang ada di kawasan. Ketegangan politik antara negara-negara anggota ASEAN dapat mempengaruhi stabilitas kerja sama maritim. Untuk itu, penting bagi AMF untuk menciptakan forum diskusi yang lebih inklusif dan netral yang dapat menjembatani perbedaan kebijakan di antara negara-negara anggota. Diplomasi yang intensif dan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif perlu diterapkan untuk menangani isu-isu sensitif terkait kedaulatan wilayah dan kedaulatan laut. Dengan pendekatan ini, negara-negara ASEAN diharapkan dapat bekerja sama secara lebih harmonis dalam memperkuat keamanan maritim dan mengatasi ancaman pembajakan dan perampokan yang semakin kompleks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah pembajakan dan perampokan di kawasan Asia Tenggara, terutama di jalur strategis seperti Selat Malaka, telah mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Ancaman ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaut, tetapi juga menghambat kelancaran arus barang global, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian internasional. Tingginya intensitas kejahatan maritim di kawasan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan langkah kolektif untuk menangani tantangan lintas batas.

AMF berperan penting sebagai platform koordinasi antarnegara untuk mengatasi kejahatan maritim di kawasan. Beberapa langkah signifikan yang diinisiasi AMF meliputi pertukaran data intelijen, pelaksanaan patroli laut bersama, latihan keamanan maritim, serta mendorong negara-negara ASEAN untuk terlibat aktif dalam kerja sama internasional. Inisiatif ini telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan tingkat pembajakan di Selat Malaka, dan peningkatan kapasitas operasional aparat keamanan maritim.

Meskipun peran AMF signifikan, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kerjanya. Tantangan tersebut meliputi isu kedaulatan maritim yang menyebabkan perbedaan pandangan antarnegara anggota, keterbatasan sumber daya manusia dan

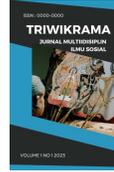


infrastruktur, serta ketegangan politik, seperti konflik di Laut China Selatan. Faktor-faktor ini memengaruhi koordinasi dan implementasi kebijakan bersama di tingkat regional.

Maka dari itu Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan maritim, penting bagi ASEAN untuk mempertimbangkan pembentukan lembaga seperti ASEANPOL, yang berfungsi serupa dengan EUROPOL di Eropa. Lembaga ini dapat menyediakan kerangka hukum yang seragam dan mekanisme koordinasi operasional lintas negara. ASEANPOL juga akan membantu menjawab pertanyaan hukum lintas yurisdiksi, seperti insiden pembajakan melibatkan kapal dari negara yang berbeda. Selain itu, penguatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur maritim, dan peningkatan diplomasi antaranggota harus menjadi prioritas agar ASEAN mampu menghadapi ancaman kejahatan maritim secara kolektif dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Bateman, S. (2003) 'Coast Guards: New Forces For Regional Order and Security', *Asia Pacific Issues*, (65), pp. 1–8.
- Bueger, C. (2015) 'What is maritime security?', *Marine Policy*, 53, pp. 159–164. doi: 10.1016/j.marpol.2014.12.005.
- Bakamla RI (2022) *ASEAN Coast Guard Forum 2022 hasilkan Deklarasi ASEAN CG*, Badan Keamanan Laut website. Available at: https://bakamla.go.id/publication/detail_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg (Accessed: October 22, 2023).
- Darmawan, A.R. (2022) *Coast Guard diplomacy and Maritime Security in Southeast Asia*, Asia and the Pacific Policy Society Policy Forum. Available at: <https://www.policyforum.net/coast-guard-diplomacy-and-maritime-security-in-southeast-asia/>
- Gaol, T. L., & Rani, F. (2017). *Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga keamanan maritim (Studi kasus perompakan di perairan selat Malaka)* (Doctoral dissertation, Riau University)
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Indraswari, R. (2022) 'ASEAN centrality: Comparative case study of Indonesia leadership', *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 10(1), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.7906>.
- Kurnia, M. P. (2006). Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia. *Risalah Hukum*, 2(1), 53-62.
- Naim, Y.J. (2021) *Diplomasi Keamanan Laut ala Bakamla RI*, Antara News. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/2551437/diplomasi-keamanan-laut-ala-bakamla-ri>
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1), 59-86.
- Oktavian, A. (2024). Penguatan Kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(4), 22.
- Rijal, N. K. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Indonesian Perspective*, 3(2), 159-179.



- Saptenno, M. J. (2012). *Overview Kejahatan Lintas Negara Terorganisir*. Retrieved from: <https://fh.unpatti.ac.id/overview-kejahatan-lintas-negara-terorganisir/>
- Sari, R. P. (2019). Upaya ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Menanggulangi Kasus Perompakan di Perairan Asia Tenggara (Studi Kasus Selat Malaka Tahun 2015-2018).